

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202.
- Agbejule, A., & Jokipii, A. (2009). Strategy, control activities, monitoring and effectiveness. *Managerial Auditing Journal*, 24, 500–522.
- Asian Development Bank. (2004). Asian Development Bank Annual Report 2004. In *Adb* (Vol. 9).
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Barro, R., & Grilli, V. (1994). *European Macroeconomics*. Macmillan Press.
- Carino, L. V. (2002). *Administrative Accountability*. San Fransisco State University Fall.
- Cutt, J., & Murray, V. (2000). *Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations*. Routledge.
- Davis, O. A., Dempster, M. A. H., & Wildavsky, A. (1966). A Theory of the Budgetary Process. *American Political Science Review*, 60(3), 529–547. <https://doi.org/DOI: 10.2307/1952969>
- Denhardt, J. ., & Denhardt, R. . (2015). The New Public Service Revisited. *Public Administration Review*, 75(5), 664–672.
- Devas, N. (2008). *Financing Local Government*. Commonwealth Secretariat.
- Fatemi, M., & Behmanesh, M. . (2012). New Public Management Approach and Accountability. *International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS)*, 1(2), 42–49.
- Ferina, I. S. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. (2004). Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review

- special edition. *Human Resource Management Review*, 14(1), 1–17.
<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2004.02.001>
- Ghartey, J. . (1987). *Crisis, Accountability and Development in the Third World*. Gower Pub Co.
- Gianakis, G. A., & McCue, C. P. (1999). Local Government Budgeting a Managerial Approach. In □□□□□ □□□□□. Greenwood Publishing Group. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Haimann, T., & Scott, W. G. (1970). *Management in the Modern Organization*. Houghton Mifflin.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Haron, S. A., Sharpe, D. L., Masud, J., & Abdel-Ghany, M. (2010). Health divide: Economic and Demographic factors associated with self-reported health among older Malaysians. *Journal of Family and Economic Issues*, 31(3), 328–337. <https://doi.org/10.1007/s10834-010-9207-2>
- Jabbara, J. ., & Dwivedi, O. . (1989). *Public Service Accountability*. Kumarian Press, Inc.
- Koppell, J. G. S. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder.” *Public Administration Review*, 65(1), 94–108. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>
- M.M Ludani, G.B Tampi, J. P. (2017). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Mamesah. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. In *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Martines-Vazquez, J., & Smoke, P. (2011). Introduction. Local Government Finance: The Challenges of the 21st Century. *ECON Publication*, 55.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., [2014]. <https://search.library.wisc.edu/catalog/9910191165602121>

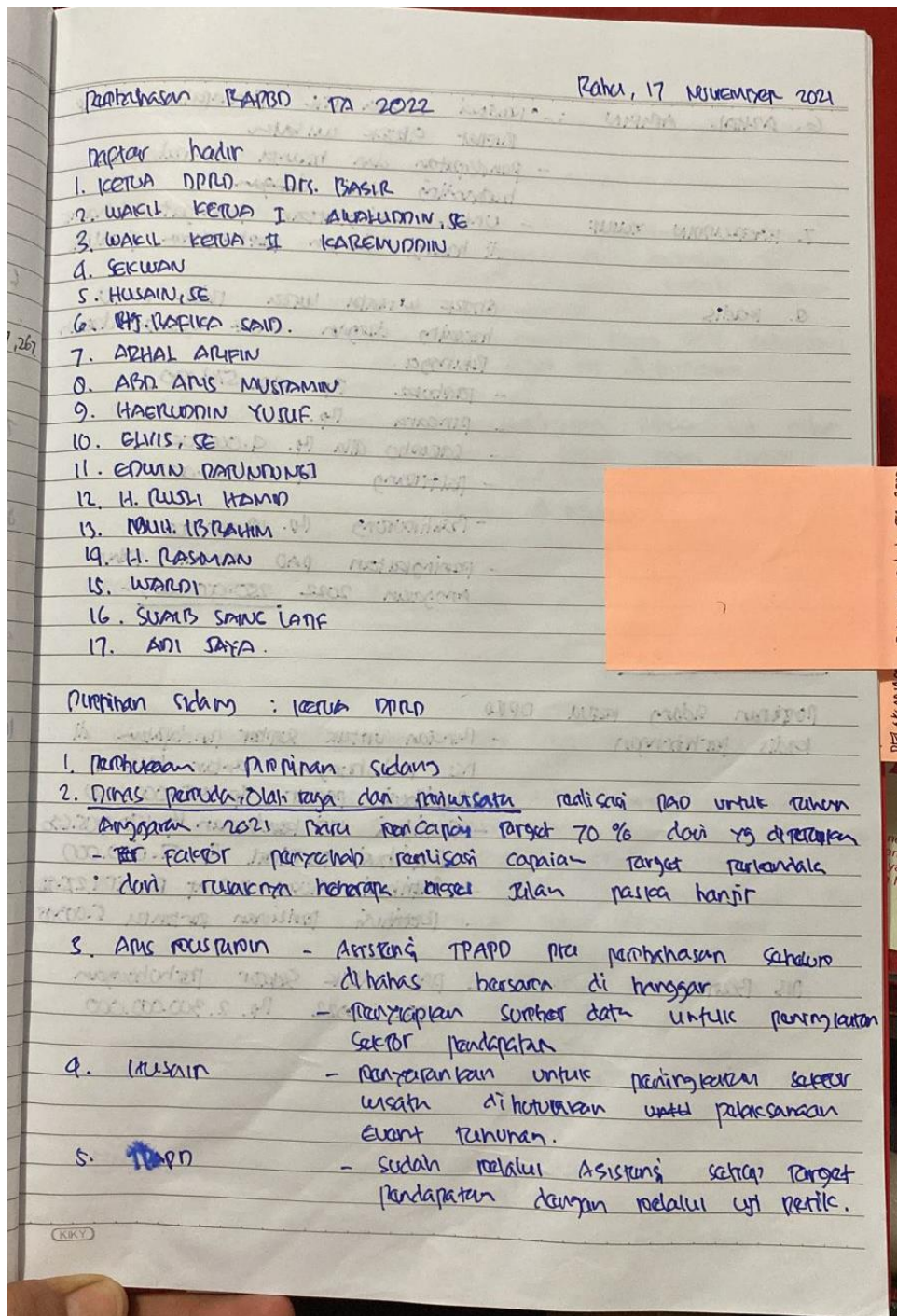
- Mitchell, D., & Thurmaier, K. (2016). (Re)Defining the Disarticulated Municipality: Budget Accountability for Networked Governance. *Public Budgeting & Finance*, 36, 47–67. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12087>
- Noveri, H. (2010). *Pengaruh Pemahaman Good Governance dengan Independensi Auditor, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Terhadap Kinerja Auditor Internal*. Universitas Andalas.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Piffner, J. ., & Presthus, R. . (1967). *Public Administration 5th edition*. The Ronald Press Company.
- Polidano, C. (1998). Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies. *Public Policy and Administration*, 13(1), 38.
- Puspita, R., & Martani, D. (2013). Analisa Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rasul, S. (2004). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja*. Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
- Rosen, B. (1989). Looking at Philosophy. *Teaching Philosophy*, 12(3).
- Schillemans, T. (2011). Does Horizontal Accountability Work?: Evaluating Potential Remedies for the Accountability Deficit of Agencies. *Administration & Society*, 43(4), 387–416. <https://doi.org/10.1177/0095399711412931>
- Schlenker, B. R., & Weigold, M. F. (1989). *Self-identification and accountability*. In R. A. Giacalone & P. Rosenfeld (Eds.), *Impressionmanagement in the organization*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Simon, H. A., Thompson, V. A., & Smithburg, D. W. (1991). *Public Administration*. Routledge.
- Sinclair, A. (1995). The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2), 219–237.

- Standbury, W. T. (2003). *Accountability to Citizens in The Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tolbert, C., & Mossberger, K. (2003). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Caroline J. Tolbert*, 66. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00594.x>
- Wang, K. (2015). *How to make sense of government accountability*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/governance/how-make-sense-government-accountability>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Risalah/Notulensi Pembahasan APBD Eksekutif-DPRD



6. AZHAR AMIN :- Rinci secara ril pendapatan setiap

- Rincian objek wisata
- pendapatan dan belanja riil dari
- rekening koran dengan

7. HAZWANI YUSUF - Untuk meningkatkan pendapatan riil di tingkat dengan perhitungan

8. KADIS

- objek wisata riil dari
- rekening dengan objek wisata daerah
- rekening

- Tambak Rp. 49.578.000

- Pincara Rp. 200.000.000

- Sateho ala Rp. 1.000.000

- Pattirang Rp. 19.000.000

- Peningkatan Rp. 10.000.000

9. Drs. BASIR

- peningkatan PAD untuk
- Anggaran 2022 250.000.000,-

Ninas Perhubungan

Perencanaan sidang kedua DPRD
Kadis Perhubungan

- Rincian untuk sumber pendapatan di
- na perhubungan antar lain

- Retribusi parkir Rp. 350.000.000

- Retribusi uji kendaraan Rp. 170.905.620

- Retribusi terminal Rp. 5.000.000

- Retribusi khusus parkir Rp. 1.250.000

- Retribusi penitisan parkir Rp. 5.000.000

Drs. BASIR

PAD untuk Sektor Perhubungan
TA. 2022 Rp. 2.300.000.000

Dinas Lingkungan hidup

Pembiayaan sudah kurang DRRP

kegiatan Lingkungan hidup : untuk rincian pendapatan di dinas lingkungan hidup bersumber dari Retribusi Pelayanan sampah sebesar Rp. 320.100.000, - untuk realisasi tahun 2021 mencapai dan target 70 di tetapkan.

Pembiayaan Adaro karena pendapatan tahun ini belum penuh dan target maka untuk proyek pendapatan tahun anggaran 2022 di naikan menjadi 360.000.000

Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian

kegiatan sumber pendapatan dari retribusi pengawakan dan pengendalian sarana telekomunikasi di mana pendapatan tahun ini target realisasi mencapai

000 ABHAL AMEN : Aplikasi sumber dari mana telekomunikasi tidak dapat di naik kan lagi

kegiatan : dapat di naik kan ketika ada pemenuhan sarana tower BTS

Pembiayaan : untuk target tahun anggaran 2022 Rp. 280.976.170, -

Dinas kesehatan

: rincian pendapatan untuk TA 2022 26.378.716.140, -

Reamah Ekst Andi Djarum.

- Pimpinan sedang kerja DPRD

- Kadis : untuk target pendapatan TA 2022 sebesar
Rp. 40.000.000.000,-

11. AZHAL ANIPW : meminta alasan kepada di rektor terkait
target capaian PAD di masa pandemi dan
seluruh Pantorei

rektor - Riset pada 40.000.000.000 dapat di capai
ketika masa seluruh pandemi covid
- Survei pada RSU tersebut dari kelain
bptis.

DR. RARIT - meminta untuk rinci survei-survei
pada RSU

Erwin Ratundungi - rinci besaran rencana JUKI urun
reca pandemi dan harapan rencana
JUKI urun di luar masa pandemi

Harudin Yusuf - estimasi pasti harapan pendapatan
RSU

Hi. Rafiq Said - pertambahan rawat inap harus
hardapuk terhadap pendapatan
RSU

DR. RARIT - Tantangan RSU terhadap hadirnya
kompetitor (RS Suciati)

Pimpinan - untuk menunjang pendapatan RSU
di pertukan herbagai sumber
dan Meresana dan pasca
Reimbursement SDN Tenaga
Medis

Pimpinan untuk target PAD RSU Rp. 40.000.000.000,-

Date _____
Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM

1. Dinas perdagangan untuk target realisasi PAD sebesar
TA. 2022 Rp 1.500.000,-

- Agus Mustamin : apakah target pendapatan sudah dilakukan
Asistensi APBD

- Pincan : Target PAD sebelum pandemi
dan masa pandemi

- R. N. : Racionalisasikan kembali pendapatan

- Nrs. Basit : Perlu upaya kerja keras untuk
kembali target.

- Azhal Arpin

- apakah pasar sore di pangur retribusi
dan kehadiran sosial bisnis yg
di pangur retribusi

- Muh. Isratin

- untuk pendapatan dari sewa
pelataran dan kios perlu di kaji
kembali tarifnya.

- TAPD

- untuk retribusi pasar sudah di
lakukan uji titik di beberapa
Pasar.

- Edwin Patondungi

= untuk tarif kembali sewa
Retribusi kas dan pelataran
dan kios di serikan untuk
retribusi perhut.

- Pimpinan sedang

: untuk target realisasi PAD
dinas perdagangan, perindustrian
KUM sebesar Rp 2.300.000.000

Date

- Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Dinas : Rincian target pendapatan dari penjualan hasil produksi hasil ikan

H. AZHAL ARFIN : Untuk meningkatkan sumber PAD dari hasil jual hasil ikan karena dinas memperbaiki kualitas bibit agar nantinya masyarakat luar tidak membeli bibit dari luar kota.

Drs. BASIR : apakah sumber pendapatan hanya dari hasil hasil sapi.

Sarah Salmi Kette : karena sumber pendapatan dapat di optimalkan

Kadis : optimisasi hasil hasil ikan dapat di optimalkan melalui perbaikan infrastruktur yg representatif.

Edun : peningkatan pendapatan dapat di lakukan dengan alokasi anggaran

Pimpinan : Untuk target PAD Perikanan dan Ketahanan Pangan Rp. 87.500.000

Lampiran 2

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Luwu Utara Tahun 2020

5. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA				
LAPORAN ARUS KAS				
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019				
Metode Langsung				
(Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Reff	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	21.960.971.045,00	23.264.801.951,05
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	10.292.019.067,00	13.436.764.631,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	4.544.885.827,00	5.170.778.462,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.1.4	70.391.129.447,55	85.735.144.679,01
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1.1.5	11.732.093.459,00	9.005.771.665,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.5.1.1.6	6.851.065.232,00	5.107.859.730,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.7	619.985.494.000,00	685.900.676.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7.5.5.1.1.8	217.931.491.945,00	223.573.634.986,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	7.5.5.1.1.9	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	7.5.5.1.1.10	52.625.487.000,00	32.630.452.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.5.1.1.11	45.559.093.422,81	36.923.234.064,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	7.5.5.1.1.12	36.547.567.000,00	16.588.460.766,07
15	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.1.13	27.140.908.247,00	5.061.992.476,00
16	Penerimaan Dana Darurat	7.5.5.1.1.14	-	-
17	Penerimaan Lainnya	7.5.5.1.1.15	48.424.150.000,00	240.911.756.800,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	7.5.5.1.1.16	-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.173.966.355.692,36	1.383.311.328.210,13
20	Arus Keluar Kas	7.5.5.1.2		
21	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2.1	495.280.999.139,00	461.303.959.662,00
22	Pembayaran Barang & Jasa	7.5.5.1.2.2	297.484.148.191,88	350.853.159.884,01
23	Pembayaran Bunga	7.5.5.1.2.3	-	-
24	Pembayaran Subsidi	7.5.5.1.2.4	-	100.000.000,00
25	Pembayaran Hibah	7.5.5.1.2.5	99.152.042.707,00	52.084.656.660,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	7.5.5.1.2.6	3.080.187.970,00	2.122.500.000,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	7.5.5.1.2.6	-	-
28	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.2.7	35.544.840.242,00	489.800.400,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	7.5.5.1.2.8	2.405.198.000,00	2.184.652.000,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	7.5.5.1.2.9	697.593.000,00	488.916.000,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.2.10	-	-
32	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	7.5.5.1.2.11	-	1.000.000.000,00
33	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.5.1.2.12	63.274.541.561,00	244.656.110.143,00
34	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik	7.5.5.1.2.13	861.791.000,00	808.391.000,00
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	7.5.5.1.2.14	-	-
36	Jumlah Arus Keluar Kas		997.781.341.810,88	1.116.091.945.749,01
37	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		176.185.013.881,48	267.219.382.461,12
38	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	7.5.5.2		
39	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1		
40	Pencarian Dana Cadangan		-	-
41	Penjualan atas Tanah		-	-
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		576.045.000,00	-
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		5.000.000,00	-
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
46	Penjualan Aset Lainnya	7.5.5.2.1	-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
49	Jumlah Arus Masuk Kas		581.045.000,00	-
50	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2		
51	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
52	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2.1	1.522.556.540,00	11.846.222.812,00
53	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2.2	44.126.419.640,00	21.965.916.459,00
54	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2.3	33.739.246.179,00	64.442.080.982,00
55	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2.4	103.149.176.771,00	160.622.062.334,00
56	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2.5	1.196.368.513,00	2.960.020.545,00
57	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2.6	-	-
58	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
59	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
60	Jumlah Arus Keluar Kas		183.733.767.643,00	261.836.303.132,00
61	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan		(183.152.722.643,00)	(261.836.303.132,00)

5. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Reff	2020	2019
62	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	7.5.5.3.		
63	Arus Masuk Kas	7.5.5.3.1		
64	Pencarian Dana Cadangan			-
65	Pinjaman Dalam Negeri		-	-
66	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
67	Penerimaan Piutang Dana Bergulir	7.5.5.3.1.3)	-	7.487.210,00
68	Penerimaan Kembali Piutang		-	-
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
70	Jumlah Arus Masuk Kas		-	7.487.210,00
71	Arus Keluar Kas	7.5.5.3.2		
72	Pembentukan Dana Cadangan			-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
74	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
75	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	2.983.000.000,00
76	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
77	Jumlah Arus Keluar Kas		-	2.983.000.000,00
78	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	(2.975.512.790,00)
79				
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.5.5.4.		
81	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1.1	53.057.980.196,00	63.760.818.703,00
83	Jumlah Arus Masuk Kas		53.057.980.196,00	63.760.818.703,00
84				
85	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2		
86	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2.1	53.046.822.949,00	63.767.178.147,00
87	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
88	Kiriman Uang			
89	Jumlah Arus Keluar Kas		53.046.822.949,00	63.767.178.147,00
90	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		11.157.247,00	(6.359.444,00)
91				
92	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5.	(6.956.551.514,52)	2.401.207.095,12
93	Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		8.678.719.629,37	6.277.512.534,25
94	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		1.722.168.114,85	8.678.719.629,37
95	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
96	Saldo Akhir Kas di BOS		-	-
97	Saldo Akhir Kas	7.5.5.6	1.722.168.114,85	8.678.719.629,37

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan

Masamba, 21 Mei 2021

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

Lampiran 3

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 2020

I. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Reff	Anggaran Setelah Perubahan 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	PENDAPATAN	7.5.1.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1.1	28.816.863.750,00	21.980.971.045,00	76,21	23.264.801.951,05
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.1.2	10.904.764.997,00	10.292.019.067,00	94,38	13.438.764.631,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.1.3	5.920.000.000,00	4.544.885.827,00	76,77	5.170.778.462,00
6	Lain-lain PAD yang sah	7.5.1.1.1.1.4	71.914.270.700,00	70.972.174.447,55	98,69	86.718.712.327,30
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		117.556.699.447,00	107.770.050.386,55	91,68	128.591.067.371,35
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.1.1.2.A				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.1.2.A.1	14.138.758.091,00	11.732.093.459,00	82,98	9.005.771.665,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.1.1.1.2.A.2	8.328.379.340,00	6.851.065.232,00	82,26	5.107.859.730,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.1.2.A.3	626.246.756.000,00	619.965.494.000,00	99,00	685.900.676.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.1.2.A.4	241.365.535.000,00	217.531.491.945,00	90,29	223.573.634.986,00
15	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN		890.079.428.431,00	866.480.144.636,00	96,23	923.587.942.361,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.1.1.2.B				
17	Dana Penyesuaian	7.5.1.1.1.2.B.1	52.625.487.000,00	52.625.487.000,00	100,00	32.630.452.000,00
19	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		52.625.487.000,00	52.625.487.000,00	100,00	32.630.452.000,00
21	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7.5.1.1.1.2.C				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.1.1.1.2.C.1	56.110.527.870,00	45.559.093.422,81	81,20	36.923.234.064,00
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7.5.1.1.1.2.C.2	41.828.044.800,00	36.547.567.000,00	87,80	16.588.460.766,07
24	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		97.938.572.670,00	82.106.660.422,81	84,01	53.511.694.830,07
26	BANTUAN KEUANGAN					
27	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-	-	-
28	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
29	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		-	-	-	-
30	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.040.443.488.101,00	991.212.292.058,81	95,27	1.009.730.089.211,07
32	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.1.1.1.3				
33	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.1.3.1	37.182.610.088,00	27.140.908.247,00	72,99	5.061.992.476,00
34	Pendapatan Dana Darurat	7.5.1.1.1.3.2	-	-	-	-
35	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.1.3.3	216.712.067.000,00	230.446.893.629,00	106,34	240.911.756.800,00
36	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		253.894.677.088,00	257.587.801.876,00	101,45	245.973.749.276,00
37	TOTAL PENDAPATAN		1.411.893.864.636,00	1.356.570.144.321,36	96,08	1.384.294.896.858,42
40	BELANJA	7.5.1.1.2				
41	BELANJA OPERASI	7.5.1.1.2.1				
42	Belanja Pegawai	7.5.1.1.2.1.1	499.772.088.468,00	495.280.999.139,00	99,10	461.303.959.662,00
43	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.1.2.1.2	297.432.394.283,37	297.484.148.191,88	103,50	350.853.159.884,01
44	Belanja Bunga		-	-	-	-
45	Belanja Subsidi	7.5.1.1.2.1.3	-	-	-	100.000.000,00
46	Belanja Hibah	7.5.1.1.2.1.4	104.440.033.351,00	99.152.042.707,00	94,94	52.084.656.860,00
47	Bantuan Sosial	7.5.1.1.2.1.5	3.414.200.000,00	3.080.187.970,00	90,22	2.122.500.000,00
48	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
49	JUMLAH BELANJA OPERASI		896.058.716.112,37	894.997.378.007,88	99,99	886.464.276.206,01
51	BELANJA MODAL	7.5.1.1.2.2				
52	Belanja Tanah	7.5.1.1.2.2.1	3.204.393.510,00	1.522.556.540,00	47,51	11.846.222.812,00
53	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.1.2.2.2	46.703.841.285,00	44.126.419.640,00	94,48	21.965.916.450,00
54	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.1.2.2.3	39.720.402.660,00	33.739.246.179,00	84,94	64.442.080.982,00
55	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.1.2.2.4	154.373.911.029,00	103.149.176.771,00	66,82	160.622.062.334,00
56	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.1.2.2.5	1.208.600.000,00	1.196.368.513,00	98,99	2.960.020.545,00
57	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
58	JUMLAH BELANJA MODAL		245.211.148.514,00	183.733.767.643,00	74,93	261.836.303.132,00
59	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.1.2.3				
61	Belanja Tak Terduga		38.961.936.000,00	35.544.840.242,00	91,23	489.600.400,00
62	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		38.961.936.000,00	35.544.840.242,00	91,23	489.600.400,00
64	TRANSFER	7.5.1.1.3				
65	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
66	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.5.1.1.3.1	2.495.000.000,00	2.405.198.000,00	96,40	2.184.652.000,00
67	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	7.5.1.1.3.2	805.351.000,00	697.593.000,00	86,62	488.916.000,00
68	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.3	-	-	-	-
69	JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		3.300.351.000,00	3.102.791.000,00	94,01	2.673.568.000,00
70	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
71	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	1.000.000.000,00
72	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		237.176.246.667,00	245.297.285.190,00		244.656.110.143,00
73	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		861.791.000,00	861.791.000,00		808.391.000,00
74	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		238.038.037.667,00	246.159.076.190,00	103,41	246.464.501.143,00
75	JUMLAH TRANSFER		241.338.388.667,00	249.261.867.190,00	103,28	249.138.069.143,00
76	JUMLAH BELANJA		1.420.570.189.293,37	1.363.837.853.082,88	95,99	1.377.928.248.861,01

1. Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai Dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)						
No	Uratan	Reff	Anggaran Setelah Perubahan 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
77						
78	SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)					
79			(8.676.324.657,37)	(8.967.708.761,52)	80,31	6.386.646.977,41
80	PEMBIAYAAN	7.5.1.1.4				
81	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.1.4.1				
82	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	7.5.1.1.4.1.1	8.676.324.657,37	8.676.324.657,37	100,00	5.285.190.469,96
83	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
84	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
85	Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
86	Penerimaan Kembali Piutang	7.5.1.1.4.1.2	-	-	-	-
87	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	7.5.1.1.4.1.3	-	-	-	7.487.210,00
88	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		8.676.324.657,37	8.676.324.657,37	100,00	5.292.677.679,96
89						
90	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
91	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
92	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	2.983.000.000,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
94	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
95	Pengeluaran Investasi Non Permanen		-	-	-	-
96	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-	-	2.983.000.000,00
97	PEMBIAYAAN BERSIH		8.676.324.657,37	8.676.324.657,37	100,00	2.309.677.679,96
98						
99	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.1.1.5	(0,00)	1.708.616.896,95	-	8.676.324.657,37

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Masamba, 21 Mei 2021
KEPALA LUWU UTARA

ENYAH PUTRI INDRIANI

Lampiran 4

Tuntutan Akuntabilitas Masyarakat terhadap Belanja Daerah



Lampiran 5

Tuntutan Akuntabilitas Siswa terhadap Anggaran Sekolah



Lampiran 6

Data PNS Luwu Utara

**DATA APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN LUWU UTARA
PER 31 DESEMBER 2020**

PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
S.3	1	0	1
S.2	91	64	155
S.1	1.403	2.089	3.492
D.IV	20	134	154
D.III	56	232	288
D.II	79	76	155
D.I	4	11	15
SLTA	439	240	679
SLTP	20	0	20
SD	17	0	17
JUMLAH	2.130	2.846	4.976

STRUKTURAL	L	P	JUMLAH
ESELON II	28	3	31
ESELON III	135	43	178
ESELON IV	301	259	560
JUMLAH	464	305	769

GOLONGAN RUANG	L	P	JUMLAH
IV	562	583	1.145
III	1.127	1.993	3.120
II	411	270	681
I	30	0	30
JUMLAH	2.130	2.846	4.976

JABATAN	L	P	JUMLAH
STRUKTURAL	464	305	769
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	951	1.840	2.791
PELAKSANA	715	701	1.416
JUMLAH	2.130	2.846	4.976

KEPANGKATAN	L	P	JUMLAH
IV/e	0	0	0
IV/d	2	0	2
IV/c	35	8	43
IV/b	286	325	611
IV/a	239	250	489
III/d	342	551	893
III/c	317	554	871
III/b	231	497	728
III/a	237	391	628
II/d	155	89	244
II/c	112	74	186
II/b	112	79	191
II/a	32	28	60
I/d	6	0	6
I/c	7	0	7
I/b	16	0	16
I/a	1	0	1
JUMLAH	2.130	2.846	4.976

AGAMA	L	P	JUMLAH
ISLAM	1.817	2.540	4.357
KRISTEN	28	33	61
KATHOLIK	231	240	471
HINDU	54	32	86
BUDHA	0	0	0
LAINNYA	0	1	1
JUMLAH	2.130	2.846	4.976